



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 2, 2025, Page: 1-12

Peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Dalam Pengelolaan Situs Warisan Dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

Mutia Sakinah*, Yuliarti

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam pengelolaan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan konsep *purposive sampling*. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisor, dan fasilitator dalam mengelola situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Namun, pengelolaan masih terkendala oleh belum adanya badan pengelola khusus, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya rasa memiliki masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pelestarian budaya dan Masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pariwisata Berkelanjutan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2810>

*Correspondence: Mutia Sakinah

Email: mutiasakinah292@gmail.com

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe the role of the Sawahlunto City Cultural Office in managing the *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* world heritage site to support sustainable tourism. The study uses a descriptive technique and a qualitative methodology. The technique of purposive sampling was used to choose informants. Data was gathered by means of document analysis and interviews. In order to promote sustainable tourism, the Sawahlunto City Cultural Office has successfully fulfilled its responsibilities as a regulator, a catalyst, and a facilitator in the management of Sawahlunto's *Ombilin Coal Mining Heritage*. However, the management still faces challenges such as the absence of a dedicated management body, limited budget and human resources, and low community sense of ownership. Therefore, collaboration among stakeholders is highly needed to achieve effective and sustainable management, providing long-term benefits for cultural preservation and the local community.

Keywords: Role, Government, Sustainable Tourism

Pendahuluan

Salah satu bidang pengembangan yang saat ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan regional adalah pariwisata. Dalam proses pembangunannya, paradigma pariwisata dewasa ini tidak lagi berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi semakin menekankan perlunya prinsip keberlanjutan (*sustainability*) agar dalam proses pembangunannya tidak terlalu menonjolkan potensi dan nilai lahan atau lahan itu sendiri sebagai aset utama daerah tujuan wisata (Dewi et al, 2023). Mengacu pada definisi yang dirumuskan oleh *United Nations World Tourism Organization* (Ferdianysah et al, 2025), untuk terus berlanjut, sebuah destinasi wisata harus menyeimbangkan kebutuhan pengunjung, pelaku usaha, lingkungan, dan masyarakat lokal dengan cara yang tidak merugikan salah satu dari aspek-aspek tersebut, termasuk pada sekarang ataupun kedepannya

Kota Sawahlunto dikenal sebagai salah satu kota tambang batubara tertua di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, aktivitas penambangan mengalami penurunan dan mengharuskan pemerintah daerah sepakat untuk mengubah fokus pembangunan dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata, dengan memanfaatkan potensi besar warisan tambang sebagai daya tarik budaya dan ekonomi. Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan kota telah berjanji untuk bekerja menuju tujuan bersama sebagaimana termuat pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001. Pemerintah kemudian mengalihfungsikan lahan bekas tambang tersebut sebagai objek wisata yang dikenal sebagai *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) resmi ditentukan dalam menjadi Situs Warisan Dunia oleh UNESCO dalam tanggal 6 Juli 2019 dalam sebuah pertemuan di Baku, Azerbaijan (Perdiana & Mubarak, 2022). Penetapan ini membuat Sawahlunto dikenal di seluruh dunia sebagai kota dengan warisan sejarah yang memiliki nilai universal yang besar terutama karena perannya dalam alih teknologi pertambangan batubara antara Indonesia dan Eropa pada masa kolonial. Agar pengakuan UNESCO ini tetap bertahan dan tidak dicabut, Kota Sawahlunto memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan situs tersebut. Untuk memastikan bahwa situs warisan dunia terjaga dengan baik dan dilindungi untuk generasi mendatang, UNESCO secara berkala menerima laporan dari negara tuan rumah. Jika situs tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sanksi dapat dikenakan atau properti tersebut dapat dicabut statusnya. Tata kelola dan upaya pelestarian yang berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui lembaga terkait, seperti Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto bertanggung jawab secara khusus dalam hal pemeliharaan asset dan pendanaan. Hal ini didukung oleh dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pelestarian serta mengelola Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, khususnya Pasal 6, dijelaskan bahwa setiap individu berhak mempunyai serta mengendalikan benda, bangunan, rancangan, maupun situs cagar budaya, asalkan tetap memperhatikan fungsi sosial dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 11 ayat 3 mengatur bahwa siapa pun yang menemukan benda, bangunan, struktur, ataupun lokasi

yang dilihat sebagai cagar budaya bertanggung jawab membuat laporan pada SKPD yang memiliki wewenang di bidang budaya. SKPD tersebut, terutama Dinas Kebudayaan, bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan mendukung upaya pelestarian cagar budaya secara langsung.

Peran Dinas Kebudayaan ini juga diperkuat oleh Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Dengan adanya peraturan ini, pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan utama menjaga dan melestarikan warisan sejarah dan budaya yang menjadi ciri khas Kota Sawahlunto sebagai kota tambang, agar tetap lestari serta bisa dinikmati dari generasi setelahnya.

Namun demikian, observasi awal menunjukkan bahwa peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk pengelolaan situs warisan Dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* mendukung pariwisata berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan seperti meskipun pengelolaan situs warisan dunia OCMHS ini melibatkan tujuh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang secara hirarki memiliki kewenangan berbeda. Meskipun ketujuh daerah ini menjadi satu kawasan pengembangan pariwisata berkelanjutan, belum ada pelaksanaan pengelolaan yang terpadu dan sinergis. Saat ini, pertanggungjawaban pengelolaan khususnya pemeliharaan aset dan pendanaan masih terfokus pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Tantangan berikutnya yaitu belum adanya badan pengelola khusus sejak ditetapkannya situs warisan dunia ini, peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam pengelolaan OCMHS belum maksimal. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain menjadi kendala utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan situs sebagai destinasi wisata budaya yang berkelanjutan serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto tentang pentingnya pelestarian situs warisan dunia ini juga menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perdiana & Mubarak (2022) meneliti pengembangan warisan budaya tambang batubara di Sawahlunto dengan pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Studi tersebut menyoroti upaya pelestarian budaya melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, serta berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perkembangan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada aspek kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat tanpa mendalami secara khusus peran institusional Dinas Kebudayaan dalam pengelolaan situs warisan dunia.

Di sisi lain, penelitian oleh Riva Mairiska et al., (2024) menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan situs warisan dunia melalui pembentukan badan pengelola khusus serta sinergi antar sektor. Penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan melibatkan masyarakat guna menjaga kelestarian situs sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Meskipun demikian, studi tersebut masih bersifat tinjauan makro terkait keberlanjutan dan

belum mengkaji secara rinci peran strategis serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai pengelola utama warisan budaya tersebut.

Dengan demikian, kedua kajian tersebut menunjukkan kekurangan penelitian yang secara spesifik membahas peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam pengelolaan situs warisan dunia OCMHS, khususnya terkait aspek kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan penguatan kemitraan lintas sektor dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang menelaah peran, kendala, dan peluang Dinas Kebudayaan dalam menciptakan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan demi keberhasilan pelestarian warisan budaya sekaligus pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sawahlunto

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam pengelolaan situs warisan Dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan situs warisan dunia ini.

Metodologi

Menggunakan metodologi deskriptif, penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang akurat dan transparan mengenai peran Kantor Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam mengawasi pelestarian situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*. Wawancara dan studi dokumentasi menjadi dasar dari mendekati kalkulasi informasi yang difungsikan pada riset tersebut.

Sampling purposif, yang didefinisikan sebagai teknik sampling di mana peneliti secara khusus memilih informan berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan tujuan penelitian, digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini (Nasution, 2023). Kabid Pemuseuman dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, pegawai divisi tersebut, anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), wisatawan, serta tokoh masyarakat setempat sebagai informan dalam penelitian ini. Tiga metode analisa informasi dipakai dalam riset tersebut untuk memproses data yang dikumpulkan: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto mempunyai peranan yang cenderung dibutuhkan dalam pemeliharaan dan pengelolaan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*. Dalam upaya pengelolaan situs warisan dunia ini pemerintah yang efektif dan optimal diimplementasikan dalam peran pemerintah dalam menjadi regulator, dinamisator, dan fasilitator (Yusuf, 2014).

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam menjadi regulator pemerintah memiliki peranan untuk mengimplementasikan peraturan ataupun implementasi untuk mengelola situs warisan tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan pedoman dasar yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelestarian budaya secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berperan menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi yang jelas agar pelestarian situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* dapat berjalan dengan terarah dan sejalan pada aturan yang ada.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwasanya Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sudah menjalankan perannya sebagai regulator dengan menjadikan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai pedoman dalam melestarikan, merawat dan menjaga situs warisan terkait.

Faktor yang disebutkan sesuai pada studi yang dibuat (Marta et al., 2023) yang mengatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan informasi cagar budaya bagi masyarakat, promosi wisata melalui media sosial, dan fasilitas penunjang untuk pemeliharaan situs bersejarah. Kesamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator didukung oleh keberadaan Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai landasan hukum formal. Keberadaan Perda tersebut memberikan legitimasi yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan dan pengaturan pengelolaan cagar budaya sehingga kedua daerah memiliki acuan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi regulasinya.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator pemerintah berperan dalam menggerakkan partisipasi multi pihak. Peran ini diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto melalui pelaksanaan program sosialisasi perizinan persetujuan bangunan Gedung di kawasan area A. Tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait prosedur perizinan pembangunan di kawasan yang termasuk dalam cagar budaya serta untuk memastikan bahwa setiap pembangunan tidak mengubah bentuk asli bangunan yang memiliki nilai sejarah tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwasanya Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto telah melaksanakan perannya sebagai dinamisator tetapi belum secara optimal karena masih dihadapkan pada tantangan seperti masyarakat yang membangun rumah di area cagar budaya tetapi tidak mengikuti aturan yang sudah ada dalam prosedur pembangunan cagar budaya, keterbatasan SDM dan perlunya kolaborasi lintas pihak. Upaya ini menjadi pondasi penting untuk mendorong kesadaran kolektif dan mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan warisan dunia yang berkelanjutan.

Faktor tersebut sesuai pada studi yang dibuat (Sugiyanto, 2022) yang menegaskan kalau manajemen dalam mengelola cagar budaya secara umum belum berjalan optimal akibat minimnya sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga diperlukan skema kemitraan yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat untuk memperkuat

pengelolaan. Selain itu hasil penelitian oleh (Anis et al, 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, hubungan antar organisasi, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi pondasi penting untuk mendorong kesadaran kolektif dan mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan warisan dunia yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam menjadi fasilitator pemerintah berperan membuat situasi yang baik untuk pelaksanaan pembangunan dalam mengantarkan banyak kebutuhan warga untuk memastikan pembangunan daerah. Berdasarkan temuan dilapangan bahwasanya Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sudah berupaya menjalankan peran sebagai fasilitator untuk mengelola situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* melalui program rehabilitasi bangunan cagar budaya yang ada di Area A, mengadakan sosialisasi dan menerbitkan buku panduan terkait pemilik dan pengelola cagar serta memberikan pembekalan dan sertifikasi bagi pemandu museum. Namun masih ada kendala yang ditemui di lapangan berupa penghargaan terhadap kompetensi pemandu wisata yang memadai masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Keadaan tersebut sesuai dengan studi yang dibuat (Pratiwi et al, 2025) yang menegaskan kalau keberhasilan pengelolaan Desa Wisata JakaGarong tidak lepas dari kontribusi pelatihan dan sertifikasi pemandu yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan kerja, inovasi, serta kepercayaan diri pemandu. Sementara itu rekomendasi (Pratiwi et al, 2025) juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dan koordinasi rutin antara desa wisata dan Dinas Pariwisata untuk mendukung pengawasan, pendampingan, dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Temuan ini mendukung argumen untuk Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto bahwa pembekalan, sertifikasi, dan penghargaan terhadap kompetensi pemandu museum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pola evaluasi, bimbingan lanjutan, dan insentif yang memadai agar profesionalisme SDM benar-benar mendukung pengelolaan kawasan warisan dunia secara optimal.

Untuk mendukung pariwisata berkelanjutan

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, kriteria keberlanjutan destinasi pariwisata dapat diartikan sebagai pengelolaan destinasi yang dilaksanakan dengan prinsip: memperhatikan keberlanjutan secara sosial-ekonomi, menjaga keberlanjutan budaya dan melestarikan keberlanjutan lingkungan. Berikut dikemukakan satu persatu:

a. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Keberlanjutan Sosial-Ekonomi di kawasan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat, pemerintah, serta pelaku wisata dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil, kapasitas SDM lokal meningkat, dan pendapatan warga bertambah melalui kegiatan wisata yang mendukung pelestarian nilai sejarah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk kelola situs warisan dunia tersebut sudah menunjukkan penerapan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial sudah adanya program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan yang telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas lokal serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Meskipun demikian, masih diperlukan strategi yang lebih terarah untuk memastikan pemerataan manfaat dan keterlibatan semua lapisan masyarakat agar tujuan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh.

Dari sisi ekonomi, terdapat kontribusi positif berupa peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha lokal yang didukung oleh komitmen bersama pemangku kepentingan. Namun keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lapangan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan kapasitas dengan pelatihan berkelanjutan serta mendampingi yang intensif terus dibutuhkan pada masyarakat bisa memiliki peranan lebih optimal dalam mengelola situs warisan ini.

Dengan demikian, keberlanjutan sosial-ekonomi di situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi. Keterlibatan ini menjadi kunci agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas kawasan.

Faktor tersebut sesuai pada riset yang dibuat (Anarta et al, 2025) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk diikutsertakan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, proses pengembangan dapat lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan para wisatawan, sehingga mutu produk dan layanan dapat meningkat sekaligus mendorong pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat lokal. Selain itu, keikutsertaan masyarakat juga berkontribusi dalam pelestarian budaya dan lingkungan, serta menciptakan suasana yang lebih ramah dan bersahabat bagi para wisatawan.

b. Keberlanjutan Budaya

Keberlanjutan Budaya di kawasan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* dapat diartikan sebagai menyoroti betapa pentingnya menjaga nilai-nilai lokal, tradisi, peninggalan sejarah, serta warisan takbenda agar dapat diteruskan secara utuh kepada generasi mendatang.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk pengelolaan situs warisan dunia tersebut sudah menunjukkan penerapan keberlanjutan mulai dari rehabilitasi fisik bangunan, penyusunan buku panduan, sosialisasi PBG, konversi koleksi museum, hingga program museum keliling. Namun optimalisasi keterlibatan masyarakat secara lebih merata masih perlu diperkuat agar upaya pelestarian nilai sejarah ini dapat berjalan konsisten, adaptif, dan benar-benar berkelanjutan di masa depan.

Faktor terkait sesuai riset yang dilaksanakan (Rahmat, 2021) menyoroti pentingnya tujuan pariwisata berkelanjutan dalam melindungi warisan budaya komunitas lokal di tengah meningkatnya paparan terhadap berbagai budaya. Proses pelestarian hanyalah awal; budaya lokal juga diharapkan berperan dalam pertumbuhan pariwisata lokal. WTO (*World Tourism Organization*) salah satu prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti yang ia nyatakan sendiri, adalah menghormati tradisi asli komunitas tuan rumah sambil juga melindungi dan meningkatkan warisan budayanya. Pemerintah sendiri mulai memahami budaya dalam menjadi komoditas yang bisa memahami keinginan masyarakat dalam melakukan wisata.

c. Keberlanjutan Lingkungan

Dalam Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 mengenai keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai pengelolaan destinasi harus memperhatikan keseimbangan ekosistem, mitigasi risiko bencana, pengendalian polusi dan perlindungan kawasan hijau penyangga agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk kelola situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* sudah mulai menerapkan dimensi keberlanjutan lingkungan di kawasan situs warisan dunia tersebut yang telah diupayakan melalui berbagai langkah, seperti pelaksanaan program mitigasi bencana museum, kegiatan monitoring rutin, kolaborasi pembersihan kawasan bersama masyarakat, serta pengendalian potensi risiko penambangan. Namun demikian upaya ini masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara lebih optimal dan konsisten

Faktor tersebut sesuai dengan riset yang dibuat (Saputra, 2024) yang menegaskan kalau pelestarian lingkungan harus menjadi unsur penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, dengan peran vital pemerintah dalam menetapkan kebijakan serta memastikan patuh pada peraturan. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia yang berfokus dalam mencari turis dan menciptakan lapangan kerja membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, serta bidang swasta.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam pengelolaan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* untuk Mendukung pariwisata berkelanjutan

a. Belum terbentuknya badan pengelola khusus

Belum adanya badan pengelola khusus yang menjadi koordinator utama dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto*.

b. Keterbatasan anggaran

Dana khusus yang dialokasikan hanya untuk pengelolaan situs ini masih belum tersedia secara memadai, sehingga sebagian besar pembiayaan masih mengandalkan anggaran umum yang sifatnya terbatas. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada minimnya kegiatan rehabilitasi bangunan, pembenahan sarana prasarana penunjang, serta pelaksanaan program edukasi publik yang seharusnya rutin dilakukan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kondisi ini membuat beberapa bangunan cagar budaya belum dapat direhabilitasi secara optimal.

c. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap situs warisan dunia ini

Rendahnya kesadaran kolektif ini tercermin dari masih adanya aktivitas pembangunan rumah di area cagar budaya yang tidak mengikuti prosedur zonasi pelestarian. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi, gotong royong, dan pemeliharaan juga masih terbatas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, masih banyak warga sekitar kawasan *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto*. yang belum memahami manfaat jangka panjang dari status warisan dunia bagi peningkatan ekonomi lokal mereka.

Simpulan

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sudah melaksanakan perannya untuk pengelolaan situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Keadaan tersebut bisa dipahami sebagai tiga standar peranan yaitu peran dalam menjadi regulator, dinamisator, serta fasilitator yang sudah terlaksana. Namun demikian, Dinas Kebudayaan tidak dapat bekerja sendiri untuk kelola situs warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* dalam mendukung pariwisata berkelanjutan karena masih menghadapi sejumlah kendala. Adapun kendalanya yaitu belum terbentuknya badan pengelola khusus, keterbatasan anggaran khususnya terkait pemeliharaan signifikan objek (*significant objects*), keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap situs warisan dunia ini.

Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan situs warisan dunia tidak hanya bergantung pada peran pemerintah saja, melainkan memerlukan adanya kolaborasi lintas sektor. Tanpa adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta, pengelolaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan sulit tercapai secara optimal. Temuan ini juga menekankan pentingnya

pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan sumber daya yang memadai untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan daya tarik situs warisan dunia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menggali lebih dalam mengenai strategi kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam upaya mewujudkan kolaborasi yang efektif. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan evaluasi dampak pengelolaan terhadap pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara praktis, perlu dibentuk badan pengelola khusus, peningkatan kapasitas SDM, penambahan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat. Sektor swasta dan pelaku usaha pariwisata juga perlu didorong berperan aktif dalam pengembangan dan promosi pariwisata yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anarta, F., & Darwis, R. S. (2025). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 212–220. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.59114>
- Bunari., Merza, D. E., Sihombing, F. L. G., Wati, L., Pasaribu, M. T. M., Syahrani, R., Alfarabi., R., Tobing, S. M. S. & Indriani, S. M. (2024). Pelestarian Cagar Budaya Desa Sungai Guntung Hilir Melalui Gotong Royong Mahasiswa KUKERTA MBKM UNRI . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 6316-6322. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4180>
- Dewi, R. N. M. S. P., Natalia, D., & Lorenza, F. A. (2023). Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penguatan Destinasi Wisata Pasca Pandemi di Desa Ekowisata Pancoh Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(2), 152. Retrieved from <https://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1695>
- Ferdiansyah, L., Afiah, N., Anggriana, S. & Aspri, A. (2025). Ketahanan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Gili Trawangan Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), pp. 487-494. doi: [10.47492/jih.v14i1.3824](https://doi.org/10.47492/jih.v14i1.3824).
- Islam, A. & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (Ikm) Di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134>
- Kurniasih, N., Nuriman, H., Wiratmo, T. G., & Hidayat, E. F. (2025). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa: Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Untuk Marine Tourism. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 6(1), 62-70. <https://doi.org/10.24198/sawala.v6i1.59529>
- Kurnia, D., Permana, D., & Anis, M. E. (2025). Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Di. *Jurnal PRINSIP*, 1(2).
- Magriaty, R. (2025). Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, Studi Kasus: Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 9(1), 87-111.

- Mairiska, R., Zulqayyim, & Nopriyasman. (2024). World Heritage Sustainability: Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1210–1218. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3993>
- Marta, A., Aminudin, A., Yogopriyatno, J., Aminudin dan Yogopriyatno, A. J., & Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Wisata Suban Air Panas Di Kabupaten Rejang Lebong, P. (2023). SENGKUNI Journal-Social Sciences and Humanities Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Wisata Suban Air Panas Di Kabupaten Rejang Lebong ARTICLE HISTORY. *Sengkuni Journal: Social Sciences and Humanities*, 4(2), 203–212. Retrieved from <http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/sengkuni>, <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.2.203-212>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau (Vol. 16).
- Nurmaulidya, S., & Prathama, A. (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Memfasilitasi Sanggar Tari di Kabupaten Mojokerto. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 15(1), 41–52. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.7473>
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (2016)
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (2021)
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (2016)
- Perdiana, V., & Mubarak, A. (2022). Pengembangan Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Kota Sawahlunto. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 209–216. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.299>
- Pratiwi, E. A., Khakim, M. S., & Yogyakarta, U. A. (2025). Pengembangan sdm dalam pengelolaan desa wisata melalui sertifikasi kompetensi kepanduan outbond di desa wisata jaka garong, *X(1)*, 77–90.
- Priatmoko, S., Purwoko, Y., Winarno, S. B., Widayati, E., Panghastuti, T., Wigati, E., & Isnugroho, E. (2025). Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Di Dusun Wotawati Di Desa Wisata “Dewi Purbo”, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *ABDIMAS: Journal Tourism & Community Service*, 2(2), 49-55.
- Purnomo, A., Lubisk, A. & Utha, M. A. (2025). Objek Wisata Berkelanjutan : Perilaku Pro-Lingkungan Yang Dipengaruhi Destinasi Pro-Sosial Dan Atributnya. *Jurnal Education And Development*, vol. 13, no. 1, pp. 547-554, Jan. 2025. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6807>
- Rahmat, K. D. (2021). Pelestarian Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.22146/jpt.58505>
- Saputra, P. D. A. (2024). The Importance of Sustainable Tourism in Maintaining Environmental Balance. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 207–217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613>

-
- Sintia, B. (2025). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(1), 396-401. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i1.111>
- Sugiyanto, S.S., B. (2022). Era Baru Dalam Kemitraan Pengelolaan Cagar Budaya: Studi Kasus Kalimantan. *Naditira Widya*, 16(2), 165–176. <https://doi.org/10.24832/nw.v16i2.508>
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, I. (2014). *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.
- Zahrona, E., Sumiarsih, E., & Yanti, R. (2025). Potensi Desa Wisata Bukit Batu Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mekar*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.59193/jmr.v4i1.383>